

# KAJIAN KENAIKAN PPN 12% DI INDONESIA

## PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Kenaikan ini diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara di tengah kebutuhan yang terus meningkat, terutama dalam sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, banyak pihak yang khawatir akan dampaknya terhadap daya beli masyarakat yang menurun.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dipungut atas seluruh transaksi penjualan dan pembelian barang atau jasa yang kena pajak. Pajak ini dikenakan oleh produsen kepada konsumen akhir, tetapi tugas untuk memungut, menyetor, dan melaporkan PPN menjadi tanggung jawab penjual, yang dikenal sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dengan kenaikan tarif ini, berbagai barang dan jasa yang sebelumnya dikenakan PPN 11% akan mengalami penyesuaian menjadi 12%, meskipun pemerintah menetapkan pengecualian untuk beberapa barang dan jasa tertentu yang dianggap esensial bagi masyarakat. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian, meskipun masyarakat perlu mempersiapkan diri menghadapi perubahan ini.

## ISI KAJIAN

### 1. 1 Dasar Hukum

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) merupakan dasar hukum utama yang mengamanatkan kenaikan PPN ini. RUU HPP sendiri dimulai sebagai RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang kemudian dirubah dan disahkan setelah proses legislatif Panjang.

### 1. 2 Implikasi Ekonomi

Kenaikan PPN dapat meningkatkan harga barang dan jasa, berpotensi menurunkan konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari 50% Produk Domestik Bruto (PDB). Ekonom menyarankan alternatif lain, seperti pajak untuk orang kaya atau penguatan pemungutan pajak yang ada, untuk menghindari beban tambahan pada Masyarakat.

### 1. 3 Dampak Kenaikan PPN

#### Dampak Positif Kenaikan PPN 12%

1. Peningkatan Pendapatan Negara: Kenaikan PPN dapat meningkatkan pendapatan negara, yang dapat digunakan untuk membiayai berbagai program dan layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
2. Investasi dalam Infrastruktur: Dengan pendapatan yang lebih tinggi, pemerintah dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk proyek infrastruktur, yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja.

3. Stabilitas Ekonomi: Kenaikan PPN dapat membantu menjaga kestabilan ekonomi dalam jangka panjang, terutama jika pendapatan tersebut digunakan untuk mengurangi defisit anggaran atau utang publik.
4. Peningkatan Kesadaran Pajak: Kenaikan PPN mungkin mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan kewajiban perpajakan, yang bisa berdampak positif pada kepatuhan pajak secara keseluruhan.
5. Mendorong Produk Lokal: Dengan kenaikan PPN, harga produk impor mungkin akan lebih tinggi, sehingga konsumen bisa lebih cenderung memilih produk lokal yang tidak dikenakan PPN atau dikenakan pajak lebih rendah.

#### Dampak Negatif Kenaikan PPN 12%

1. Penurunan pertumbuhan konsumsi rumah tangga terkait fenomena pre-emptives inflation: Pada triwulan III-2024, pertumbuhan konsumsi rumah tangga tercatat hanya 4,91% secara tahunan dan turun 0,48% secara triwulanan. Sebelum tarif PPN 12% berlaku pada Januari 2025, terjadi inflasi mendahului akibat penyesuaian harga oleh pelaku usaha ritel dan manufaktur untuk menjaga margin keuntungan. Kenaikan tarif diprediksi akan mendorong inflasi hingga 4,11%, yang dapat mengoreksi konsumsi rumah tangga.
2. Penurunan Omzet UMKM: Menurut laporan Bank BRI, omzet UMKM turun hingga 60% selama periode deflasi Mei-September 2024. Kenaikan PPN dianggap dapat memperburuk situasi ini.
3. Daya Beli Tertekan: Kenaikan PPN diproyeksikan meningkatkan harga barang dan jasa kena pajak sebesar 9%, yang pada akhirnya menurunkan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 0,14% dan konsumsi rumah tangga hingga 0,37%.
4. Penurunan Kontribusi Ekspor: Tarif PPN yang lebih tinggi meningkatkan biaya produksi barang ekspor, sehingga mengurangi daya saing produk Indonesia di pasar global. Pada tarif 12%, kontribusi ekspor diperkirakan turun hingga minus Rp 11,63 triliun.
5. Pertumbuhan Ekonomi Lebih Rendah: Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan lebih rendah pada 4,03%, dibandingkan proyeksi 5,1% oleh lembaga Internasional seperti World Bank dan IMF.

#### 1. 4 Pengaruh Terhadap Daya Beli

Pemerintah berpendapat bahwa dampak inflasi dari kenaikan ini akan minimal, tetapi banyak pengamat dan pelaku usaha khawatir bahwa harga barang akan meningkat, yang dapat menekan daya beli Masyarakat.

#### 1. 5 Analisis Akademis

Dari segi analitis, kenaikan PPN 12% dianggap sebagai langkah lanjutan dalam meningkatkan penerimaan negara, terutama dari kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke atas. Namun, strategi sosialisasi yang tepat diperlukan agar masyarakat memahami tujuan dan lingkup kebijakan ini.

#### 1. 6 Simulasi Perhitungan

Untuk memahami betapa besar efektivitas kenaikan PPN, perlu dilakukan simulasi perhitungan. Misalkan sebuah barang dengan harga Rp 100.000 dikenakan PPN 11%, maka PPN yang dibayarkan adalah Rp 11.000. Jika PPN dinaikkan menjadi 12%, maka PPN baru adalah Rp 12.000. Selisih antara kedua nilai pajak adalah Rp 1.000, yang artinya kenaikan sekitar 9,09% dari total harga asli.

### 1. 7 Reaksi Publik

Reaksi publik terhadap kenaikan PPN sangat beragam. Sejumlah organisasi dan individu mengemukakan kebijakan ini karena potensinya untuk mencederai daya beli masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah yang masih bergantung pada konsumsi domestik.

### POINT PENTING

Kenaikan PPN menjadi 12 persen menjadi kondisi buruk bagi masyarakat, terutama pada ekonomi masyarakat yang menengah kebawah, efek dari kenaikan ini akan meningkatkan biaya hidup dan berdampak bagi ekonomi menengah kebawah. Pemerintah harus mempertimbangkan pilihan lain yang lebih inovatif dan adil untuk meningkatkan pendapatan pemerintah tanpa membebani masyarakat. Sebelum menaikkan PPN menjadi 12%, pemerintah harus memberikan fasilitas kepada UMKM di daerah atau desa untuk mengembangkan produk yang ada. Hal ini penting agar setelah kenaikan PPN, masyarakat menengah ke bawah juga memiliki usaha, sehingga tidak menambah angka kemiskinan di Indonesia. Pemerintah juga perlu mengawasi harga jual beli di pasar agar tidak terjadi lonjakan harga barang pokok. Daya beli masyarakat yang kuat memungkinkan pemerintah menetapkan tarif pajak konsumsi yang lebih tinggi tanpa mengurangi kesejahteraan ekonomi. Selain itu, stabilitas ekonomi di negara ini yang ditandai dengan inflasi rendah dan konsumsi domestik yang baik membuat penerapan PPN yang tinggi lebih efektif dan tidak terlalu membebani masyarakat serta tidak menekan pertumbuhan ekonomi.

### Kesimpulan :

Kenaikan tarif PPN menjadi 12% pada awal 2025 menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat dan pakar ekonomi. Sementara pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dan memperbaiki rasio pajak, kekhawatiran terhadap dampaknya pada daya beli masyarakat dan sektor UMKM tetap menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang efektif dan strategi mitigasi untuk meminimalkan dampak negatif dari kebijakan ini.

### Sumber

1. <https://news.detik.com/berita/d-7701360/said-abdullah-kenaikan-ppn-jadi-12-amanat-uu-hpp-yang-berlaku-sejak-2021>
2. [https://uir.ac.id/kenaikan-ppn-12-perlu-pemahaman-mendalam-dan-strategi-sosialisasi-yang-tepat-pada-masyarakat.html?utm\\_source=chatgpt.com](https://uir.ac.id/kenaikan-ppn-12-perlu-pemahaman-mendalam-dan-strategi-sosialisasi-yang-tepat-pada-masyarakat.html?utm_source=chatgpt.com)

3. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20241223185032-532-1180388/5-fakta-ppn-naik-jadi-12-persen>
4. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20241226115653-4-598783/mui-desak-prabowo-tunda-kenaikan-ppn-jadi-12-ini-alasannya>
5. <https://nasional.sindonews.com/read/1508489/15/ppn-12-tuai-kritik-perak-indonesia-beban-bagi-perempuan-1735197142>
6. <https://www.voaindonesia.com/a/pengamat-batalkan-kenaikan-ppn-jadi-12-persen/7915003.html>
7. <https://emedia.dpr.go.id/2024/05/17/masih-perlu-kajian-mendalam-terapkan-kenaikan-ppn-jadi-12-persen-di-2025/>
8. [Menelisik Dampak Kenaikan PPN 12 Persen: Ancaman bagi Masyarakat atau Solusi Ekonomi? - PAJAK.COM](#)
9. [Kapan PPN 12 Persen Berlaku dan Apa yang Kena?](#)
10. [Resmi! Pemerintah Umumkan PPN Tetap Naik Jadi 12% Mulai 1 Januari 2025](#)
11. <https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/pahami-apa-itu-ppn>
12. <https://www.merdeka.com/uang/menko-airlangga-masyarakat-pilih-keberlanjutan-kebijakantarif-ppn-naik-12-persen-dilanjutkan-98862-mvk.html?page=2>
13. <https://www.merdeka.com/politik/lempar-bola-panas-pdip-bongkar-bukti-kenaikan-ppn-12-inisiatif-jokowi-265193-mvk.html>
14. <https://www.merdeka.com/uang/bahaya-ppn-12-persen-masyarakat-kelas-menengah-makin-terhimpit-259732-mvk.html>

PPN dapat menjadi sumber pendapatan tambahan bagi pemerintah yang digunakan untuk mendukung program-program fiskal, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, efektivitas penggunaan dana tambahan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat agar tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar bagi masyarakat. Kenaikan PPN menjadi 12% di Indonesia menimbulkan berbagai reaksi, terutama dalam konteks lemahnya penegakan hukum terhadap korupsi. Masyarakat merasa terbebani oleh pajak yang lebih tinggi, sementara mereka menyaksikan praktik korupsi yang terus merajalela tanpa adanya hukuman tegas bagi para pelakunya. Dalam konteks ini, penting untuk menekankan bahwa tanpa reformasi hukum yang kuat dan penegakan tegas terhadap korupsi, kebijakan pajak yang baru ini hanya akan menambah beban masyarakat tanpa memberikan solusi nyata untuk meningkatkan kesejahteraan.